



Jurnal

ISSN : 2088-7086

Manajemen Bisnis

PUSAT PENERBITAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

- Mukhlis Sufri

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(STUDI KASUS KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN)

- Iwan Perwira

PENGARUH PROMOSI JABATAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PADA
KARYAWAN CELEBES TV DI KOTA MAKASSAR

- Djamaluddin
Bijaang

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERILAKU KONSUMEN
DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN PONSEL MEREK SAMSUNG GALAXY DI
MAKASSAR

- Hernita

ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR DAN Keadilan Organisasi pada
Bisnis Resto ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR AND ORGANIZATIONAL
JUSTICE IN RESTAURANT BUSINESS

- Kodding Haseng

ANALISIS PEGARUH Bauran Pemasaran terhadap keputusan pembelian
Motor Yamaha Xeon GT 125 pada PT. SURACO JAYA ABADI MOTOR DI
MAKASSAR

- Ilham Labbase

DAMPAK PERILAKU PENGGUNA APLIKASI LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK
(ALPP) TERHADAP KINERJA PEMERIKSAAN PAJAK DENGAN PENDEKATAN
TEKNOLOGI ACCEPTANCE MODEL (TAM) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
MAKASSAR UTARA

- Rismawati

PENGARUH STRES KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI AIR TRAFFIC CONTROL
(ATC) PADA KANTOR LAYANAN JASA LALU LINTAS PENERBANGAN MATSC PT.
ANGKASA PURA I (PERSERO) MAKASSAR

- Nirwana Nur

ANALISIS FLUKTUASI LABA TERHADAP KEBIJAKAN PEMBAYARAN DIVIDEN
PADA PT. TELKOM (PERSERO) TBK. "INCOME FLUCTUATION ANALYSIS OF
DIVIDEND PAYMENT POLICY OF PT. TELKOM (PERSERO) TBK.

- Ilham

PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA
KARYAWAN BANK MUAMALAT DI KOTA MAKASSAR

- Jamaluddin

PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT.
NUSEMBADA BANGUNINDO DI MAKASSAR

P3I FE-UMI

**PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(Studi Kasus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)**

Mukhlis Sufri

Dosen Fakultas Ekonomi UMI Makassar

e-mail : mukhlis_sufri07@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul pengembangan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan dengan mengambil daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Location Question (LQ), analisis tipologi, Gini Ratio, serta analisis statistik untuk faktor yang dominan berpengaruh terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi lokal yang dikembangkan lebih dominan berbasis pada sumber daya yang ada, terutama pada sektor pertanian dan sektor industri dan pertambangan, serta jasa-jasa. Jika potensi lokal ini tidak dikembangkan secara optimal, maka daerah tersebut akan berpengaruh terhadap ketimpangan dan kemiskinan. Sedangkan faktor yang signifikan terhadap kemiskinan yang terjadi adalah faktor pendidikan dan aktivitas ekonomi yang berada pada sektor tertentu, sehingga berdampak pada ketimpangan pendapatan sebagai penyebab terjadinya kemiskinan pada daerah tersebut. Selanjutnya ketimpangan pendapatan yang perlu diwaspadai terdapat di daerah daratan. Baik daratan maupun lautan dalam rangka penanggulangan kemiskinan diperlukan strategi dan arah pengembangan ekonomi lokal, diharapkan dapat mengatasi ketimpangan pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan.

Kata Kunci : *Ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan.*

ABSTRACT

This study titled local economic development and poverty reduction by taking Pangkajene and Kepulauan district as research objects. This study uses secondary data and primary data. The analytical tool used in this research is the analysis of Location Question (LQ), tipologi analysis, Gini Ratio, as well as statistical analysis of the dominant factors that influence the poverty.

The results showed that the local economy is more dominant developed based on existing resources, especially in the agricultural sector and the industrial sector and mining, and services. If the local potential is not developed optimally, then the area will affect the inequality and poverty. While a significant factor to the poverty that occurs is the factor of education and economic activity is at a particular sector, so the impact on income inequality as a cause of poverty in the area. Furthermore, income inequality that needs to be aware of the region mainland. Both land and sea in order to reduce poverty takes strategy and direction of local economic development, is expected to address income inequality and reduce poverty.

Keywords : *Local economy and poverty reduction.*

A. Latar Belakang

Problem ekonomi bangsa sampai saat ini masih berkisar pada soal kesenjangan yang terjadi antara lapisan penduduk. Karena itu setiap upaya untuk mengurangi tingkat kesenjangan tidak terlepas dari cara dan metode dalam penanggulangannya.

Konsep kemiskinan tidak hanya dimaknai secara sempit, bahwa kemiskinan diartikulasikan sebagai penyebab faktor ekonomi saja, melainkan kemiskinan itu juga disebabkan karena faktor non-ekonomi karena keterbatasan mengakses pendidikan, kesehatan, serta adanya kebijakan pembangunan yang tidak optimal berpihak secara struktural kepada masyarakat karena berbagai faktor dan indikator yang tidak dapat memenuhi standar kelayakan untuk kelangsungan hidup dan ketidakmampuan mengakses sumber daya produktif didalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

Kondisi lain yang memungkinkan terjadi ketika terjadinya pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan, namun tidak seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin pada sisi yang lain. Dengan kondisi yang bertolak belakang inilah kemudian menjadi pendorong pentingnya mengulas dalam kajian ini melalui pendekatan konsep dan pendekatan empirik dengan, mengambil gambaran pengembangan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan maksud mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan merumuskan kebijakan didalam penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka itu diharapkan dapat menjawab masalah-masalah yang mengemuka antara lain tentang sektor-sektor yang dapat dikembangkan dalam rangka mengatasi ketimpangan dan menanggulangi kesiskinan, serta faktor – faktor yang mempengaruhinya.

B. Konsep Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Ekonomi Lokal

1. Pembangunan dan Ekonomi

Secara spesifik Jhingan (2007) mengemukakan perkembangan ekonomi dalam tiga cara.

Pertama, perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang.

Kedua berkaitan dengan kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam jangka panjang.

Kemudian **Ketiga** ada kecenderungan lain untuk mendefinisikan perkembangan ekonomi dari titik-titik kesejahteraan.

Sisi lain dikemukakan oleh Chenery (1989) pada umumnya transformasi negara-negara berkembang adalah sektor pertanian ke sektor industri. Memberi arti ada perubahan struktur dari tradisional ke sektor modern.

Kemudian secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi, perdagangan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus-menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui pendapatan perkapita.

Pembangunan sebagai suatu konsep tentu mempunyai hubungan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pengaruh dari berbagai faktor terhadap pembangunan ini juga terpolarisasi dalam pandangan para ahli. Todaro (1983) misalnya, mengemukakan tiga faktor yang berpengaruh terhadap suatu pembangunan. Ketiga faktor tersebut adalah:

- 1) Akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia,
- 2) Perkembangan penduduk dalam arti peningkatan tenaga kerja baik kuantitas, maupun kualitas, dan

3) Kemajuan teknologi, yakni hasil cara baru yang telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Pandangan Todaro tersebut mengemukakan jika pembangunan dipengaruhi oleh akumulasi modal dan investasi, perkembangan tenaga kerja serta pemanfaatan teknologi dalam proses produksi.

Selanjutnya, bila pembangunan diletakkan dalam *term* perubahan sosial, maka dapat digunakan hasil penelitian Lerner (1978) untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial tersebut. Faktor-faktor dimaksud adalah :

- 1) Urbanisme, yaitu mobilitas fisik yang pada gilirannya mempengaruhi mobilitas sosial. Dengan mobilitas yang bersangkutan memperoleh pengalaman baru,
- 2) Kemampuan membaca dan menulis,
- 3) Partipasi media sebagai penganda mobilitas, dan
- 4) Empati, yaitu kemampuan melihat diri sendiri didalam situasi orang lain.

Pandangan Todaro dan Lerner tersebut dapat menjadi referensi dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi konsep pembangunan serta hasil-hasil yang dicapai.

Karena dengan menggabungkan kedua pandangan diatas, maka konsep pembangunan dipandang tidak saja dari sisi ekonomi – melainkan juga dari sisi perubahan sosial yang keduanya penting dan punya pengaruh sedemikian rupa.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal

Dalam pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal pada hakekatnya merupakan proses kemitraan antara pemerintah daerah dengan para stake holders termasuk sektor

swasta dalam mengelola potensi sumber daya yang ada dan mengoptimalkan kearah maupun kelembagaan secara lebih baik dengan tujuan untuk mendorong prakarsa lokal mendorong pertumbuhan ekonomi.

Orientasi ini fokus pada proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi (Blakely, 1989).

Dengan perspektif yang telah dikemukakan diatas, maka jelas kiranya jika pembangunan pada intinya dimaksudkan sebagai upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam berbagai dimensi yang dilakukan secara terencana untuk jangka waktu tertentu. Ini berarti pembangunan tersebut melibatkan pelaku, terdapat proses didalamnya serta arah yang ingin dicapai dalam berbagai aspek kehidupan.

Lebih jauh pengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat diungkap oleh Blakely bahwa tujuan dari setiap strategi pengembangan ekonomi lokal, berorientasi pada peningkatan kualitas penduduk dan menyediakan lapangan kerja, penciptaan stabilitas ekonomi lokal dan membentuk keberagaman ekonomi yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Selain itu dikemukakan pula bahwa penyerapan tenaga kerja disesuaikan dengan sektor mana yang memiliki peran dominan dalam pengembangan ekonomi lokal, serta hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi luar, memantau potensi lokal dalam perkembangan ekonomi, stabilitas, dan mengurangi kemungkinan penghalang dalam pengembangan dan perubahan ekonomi lokal dan wilayah. Kemudian mempelajari kemungkinan penting memperhatikan populasi lokal dan kepemimpinan politik agar setiap kebijakan ekonomi lebih mengarah kepada kepentingan yang berdampak luas pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pelayanan pada kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan lokal dan terintegrasi ke

dalam lingkungan masyarakat.

3. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensional. Berkaitan dengan itu, Nugroho dalam Dewanta dkk (1995), mencoba mensimplifikasi pengertian atas konsep kemiskinan ini dalam tiga dimensi.

Pertama yakni dimensi ekonomi atau material. Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material yakni pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan lain-lain.

Oleh sebab itu, terhadap suatu komunitas yang dipandang berada pada garis kemiskinan umumnya juga disejajarkan dengan mereka yang kualitas hidupnya rendah. Demikian pula sebaliknya, terhadap mereka yang tidak berada dalam situasi yang miskin biasanya disepadankan dengan orang atau kelompok orang yang kualitas hidupnya baik.

Berbagai pendapat dan penjelasan di atas, maka pemaknaan terhadap kemiskinan dapat menggunakan gambaran yang dikemukakan oleh Bank Dunia (2007) sebagai berikut :

a. Gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai

disini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

4. Penanggulangan Kemiskinan

Sebelum mengurai konsep penanggulangan kemiskinan, maka penting memahami penyebab kemiskinan. Menurut Piven dan Cloward (1993), mengemukakan sebab kemiskinan dalam lima kategori.

Pertama, yakni kemiskinan karena sebab individual atau patologis. Kemiskinan dalam konteks ini dilihat sebagai akibat dari perilaku, pilihan atau kemampuan dari si miskin.

Kedua, yakni kemiskinan karena sebab keluarga. Kemiskinan jenis ini menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.

Ketiga, yakni kemiskinan karena sebab sub-budaya. Dalam konteks ini kemiskinan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.

Keempat, kemiskinan karena sebab agensi. Kemiskinan ini dipandang sebagai kondisi yang diakibatkan dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah dan ekonomi.

Kelima, kemiskinan karena sebab struktural. Kemiskinan jenis ini dipandang sebagai kondisi yang merupakan hasil dari struktur sosial.

Dalam konteks inilah kebijakan pemerintah diperlukan untuk menghubungkan antara realitas sosial ekonomi dengan sumber daya yang dapat diakses. Ini sejalan dengan pandangan Conhran dan Malone (1995) yang dikutip oleh Yustika (2003) bahwa sebuah kebijakan dimaknai sebagai publik (Kebijakan publik) bila kebijakan tersebut berkaitan dengan keputusan dan tindakan pemerintah yang didesain untuk menyelamatkan persoalan rakyat (*Public concern*). Ini berarti bahwa pada

batas-batas tertentu, persoalan kemiskinan sebenarnya bukan masalah yang melekat pada mereka yang miskin saja, melainkan disana terdapat tanggung jawab Negara (Pemerintah) yang menyebabkan mereka miskin dan untuk itulah bukan menjadi halangan jika tidak ingin dikatakan wajib pula Negara (Pemerintah) hadir dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ini.

METODE KAJIAN DAN HASIL STUDI EMPIRIS

A. Metode Kajian

Studi ini berlokasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam operasionalisasinya menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif. Kemudian menggunakan data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kajian ini, karena itu dapat digunakan analisis Tipologi, LQ, Gini Ratio dan stasistik untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

B. Hasil Studi Empiris

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi dan keunggulan tersendiri. Dengan menggunakan analisis simultan melalui tipologi Klassen dan LQ hasil studi diungkap sebagai berikut:

1. Hasil studi menggunakan Klasifikasi Klassen dan LQ sebagai berikut :

1. **Tipologi 1** : Sektor cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) adalah sektor yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB rata-rata diatas pertumbuhan PDRB

Sulawesi Selatan dan kontribusi sektor diatas rata-rata kontribusi sektor Provinsi Sulawesi Selatan.

2. **Tipologi 2** : Sektor maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah sektor yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB rata-rata lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan dan kontribusi sektor yang lebih tinggi rata-rata diatas kontribusi sektor Provinsi Sulawesi Selatan.

3. **Tipologi 3** : Sektor berkembang cepat (*high growth but low income*) merupakan sektor yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB rata – rata lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan dan kontribusi sektor yang lebih rendah rata-rata diatas kontribusi sektor Provinsi Sulawesi Selatan.

4. **Tipologi 4** : Sektor relatif tertinggal (*low growth and low income*) merupakan sektor yang mempunyai laju rata-rata pertumbuhan PDRB dan kontribusi sektor yang lebih rendah dari rata-rata kontribusi sektor Propinsi Sulawesi Selatan.

Hasil analisis Tipologi untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terlihat bahwa dari sembilan sektor ekonomi, tidak ada satupun sektor ekonomi yang berada pada **Kuadran I** yakni sektor cepat maju dan cepat tumbuh yang ditunjukkan oleh sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor diatas pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor ekonomi Provinsi.

Tabel 1
Klasifikasi Tipologi Klassen

Kuadran I Sektor maju dan tumbuh dengan pesat: Tidak ada	Kuadran II Sektor maju tapi tertekan: 1. Sektor industri pengolahan
Kuadran III Sektor potensial/masih dapat berkembang dengan pesat: 1. Sektor pertanian 2. Sektor pertamb. & penggalian 3. Sektor jasa-jasa	Kuadran IV Sektor relatif tertinggal: 1. Sektor listrik, gas & air bersih 2. Sektor bangunan 3. Sektor perdag. Hotel & restoran 4. Sektor angkutan & komunikasi 5. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

Sementara pada kriteria dua, ada satu sektor pada klasifikasi ini yaitu sektor industri pengolahan yang berarti sektor ini termasuk sektor ekonomi yang maju tetapi tertekan. Pada kriteria tiga yaitu sektor yang potensial/masih bisa berkembang dengan pesat terdapat tiga sektor, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa-jasa sedangkan sektor pada klasifikasi empat yaitu sektor yang relatif tertinggal terdapat lima sektor meliputi sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi serta sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Untuk melihat kecenderungan pergeseran struktur ekonomi basis dan non basis dilakukan analisis LQ. Suatu sektor pada daerah tertentu yang memiliki nilai indeks $LQ > 1$ menunjukkan bahwa sektor tersebut adalah sektor basis demikian pula sebaliknya. Model ini diharapkan memberikan informasi tentang sektor yang dianggap unggul. Dengan sektor basis yang dimiliki suatu daerah, maka suatu daerah akan mampu membangun kemandirian ekonomi lokal. Untuk lebih jelasnya hasil analisis ditunjukkan pada **Tabel 2**.

Tabel 2
Hasil Analisis LQ

LAPANGAN USAHA	2006	2007	2008	2009
Pertanian	0.41	0.61	0.68	0.76
Pertamb. & Penggalian	0.49	0.55	0.67	0.82
Industri Pengolahan	3.51	3.87	4.25	4.82
Listrik Gas & Air Bersih	-	0.38	0.40	0.39
Bangunan	0.51	2.43	0.53	0.56
Perdag. Hotel & Restoran	2.82	0.28	0.31	0.33
Angkutan & Komunikasi	0.43	0.43	0.44	0.44
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0.37	0.39	0.45	0.48
Jasa-jasa	0.67	0.76	1.01	1.38

Sumber: Data BPS setelah diolah, 2012.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun selama periode 2006 sampai dengan 2009, sektor pertanian tidak lagi merupakan sektor basis dengan indeks $LQ < 1$, demikian pula dengan sektor pertambangan dan penggalian dimana selama periode pengamatan nilai LQ nya juga lebih kecil dari satu. Sektor yang menjadi sektor basis selama periode pengamatan adalah sektor industri pengolahan dengan $LQ > 1$ dan mendominasi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sektor perdagangan hotel dan restoran menjadi sektor basis di tahun 2006 tetapi untuk tahun-tahun berikutnya tidak lagi menjadi sektor basis. Sektor jasa-jasa tampaknya menjadi sektor yang memiliki prospek perkembangan yang menggembirakan karena untuk tahun 2006 dan 2007 belum menjadi sektor basis tetapi pada tahun 2008 dan

2009 sudah menjadi sektor basis.

1. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dapat dimaknai sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Keadaan tersebut terjadi akibat ketidakcukupan pendapatan secara materil tanpa mengabaikan ukuran-ukuran fisiologi, psikologik, dan sosial. Membahas tingkat kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengarahkan pada upaya untuk menemukan berbagai faktor penyebab terjadinya kemiskinan di daerah tersebut. Olehnya itu, pembahasan awal diarahkan untuk mendeskripsikan data-data tentang tingkat kemiskinan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2009

Kecamatan	Rumah Tangga	Jml Penduduk	Penduduk Miskin	%
Liukang Tangaya	4,326	18,403	5,672	30.82
Liukang Kalmas	2,999	12,743	4,822	37.84
Liukang Tupabbiring	3,889	17,756	6,052	34.08
Liukang Tupabbiring Utara	3,180	13,855	4,722	34.08
Pangkajene	9,475	39,866	5,458	13.69
Minasatene	6,933	31,017	4,720	15.22
Balocci	4,196	15,727	5,053	32.13
Tondong Tallasa	2,870	9,839	4,531	46.05
Bungoro	9,679	42,282	5,531	13.08
Labakkang	12,807	46,983	9,318	19.83
Ma'rang	8,425	32,888	5,924	18.01
Segeri	4,813	19,929	4,004	20.09
Mandalle	3,339	12,735	3,093	24.29
Jumlah	76,931	314,023	68,900	21.94

Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2010

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene Kepulauan tahun 2009 adalah 21,94% dari total jumlah penduduk.

Penyebaran penduduk miskin di tiap kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tampaknya relatif bervariasi. Jika diklasifikasi kecamatan-kecamatan perkotaan dan yang dekat dengan perkotaan terlihat memiliki tingkat kemiskinan yang relatif kecil dibanding kecamatan di kepulauan dan di pelosok. Data tersebut memperlihatkan bahwa kecamatan dengan persentase jumlah penduduk miskinnya paling kecil adalah Kecamatan Bungoro, menyusul Kecamatan Pangkajene sebagai Ibu kota Kabupaten dan Kecamatan Minasatene.

Sedangkan daerah yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi adalah Kecamatan Tondong Tallasa, menyusul Kecamatan Liukang Kalmas, Liukang Tupabbiring, Liukang Tupabbiring Utara, dan Liukang Tangaya yang semuanya

merupakan daerah di wilayah Kepulauan. Satu-satunya kecamatan daratan yang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi adalah Kecamatan Balocci.

Kecamatan Labakkang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar tampaknya menjadi penyumbang terbesar terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan walaupun penduduk miskin di daerah tersebut jauh lebih kecil persentasenya dibanding kecamatan kepulauan. Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Labakkang adalah sebesar 9.318 jiwa atau 29,83% dari total penduduk di kecamatan tersebut yaitu sebesar 46.983 jiwa namun kontribusinya terhadap kabupaten menjadi dominan dibanding kecamatan lainnya yaitu menyumbang 13,52% terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan 2,97% dari total penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan dengan perhitungan gini ratio. Perhitungan gini ratio dimaksudkan untuk menjelaskan apakah di daerah ini terjadi ketimpangan pendapatan.

2. GINI RATIO

Gini Rasio yaitu suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga angka 1, menjelaskan kadar pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan. Semakin kecil v atau semakin mendekati nol pertanda semakin baik atau semakin merata distribusinya. Di lain pihak, apabila koefisiennya semakin besar atau semakin mendekati satu, mengisyaratkan distribusi semakin timpang atau senjang. Secara visual angka Gini Rasio dapat ditaksir langsung dari Kurva Lorenz, yaitu perbandingan luas area yang terletak antara Kurva Lorenz dengan diagonal terhadap luas area segi tiga OBC. Semakin melengkung Kurva Lorenz akan semakin luas area yang dibagi, Gini Rasionya semakin besar, mengisyaratkan distribusi pendapatan yang

semakin timpang. Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1, 0 (Nol) berarti pemerataan mutlak dan 1 (satu) berarti ketimpangan mutlak. Keadaan pembagian pendapatan dikatakan Ketimpangan rendah jika nilai Gini Rasionya antara 0,20-0,35 dan disebut ketimpangan sedang jika nilai Gini Rasionya antara 0,36 - 0,50 serta disebut ketimpangan tinggi jika nilai Gini Rasionya diatas 0,50.

Dalam kajian ini, dilakukan perbandingan antara tingkat kemiskinan yang dilihat dari distribusi pendapatan antara kecamatan di daerah kepulauan dengan kecamatan didaratan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah di kedua wilayah tersebut terdapat perbedaan ketidakmerataan pendapatan dilihat dari angka gini rasionya, walaupun memang sudah dapat diketahui bahwa di dua wilayah tersebut memang ada kesenjangan pendapatan tetapi paling penting perlu dimaknai apakah ada distribusi yang timpang atau tidak. Untuk lebih jelasnya hasil pengolahan data dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Perhitungan Gini Ratio Untuk Kecamatan Kepulauan

Golongan Pendapatan	Pendapatan Dalam Kelas			Proporsi Kumulatif		Gini Ratio
	Jumlah	Rasio	%	%	Rasio	
20% terendah	32.500.000	0,0790	7,90	7,90	0,0790	0,0158
20% kedua	45.200.000	0,1099	10,99	18,89	0,1889	0,0378
20% ketiga	58.050.000	0,1411	14,11	33,00	0,3300	0,0660
20% keempat	83.950.000	0,2041	20,41	53,40	0,5340	0,1068
20% teratas	191.700.000	0,4660	46,60	100,00	1,0000	0,2000
Jumlah	411.400.000		100,00			0,4264
Gini Ratio						0,5736

Sumber: Data primer setelah diolah, 2012

Hasil perhitungan gini ratio tersebut mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan di Kecamatan Kepulauan termasuk kategori tinggi karena nilainya sebesar 0,57. Dari proporsi pendapatan dapat juga dilihat bahwa 40% golongan berpendapatan rendah hanya

membagi total pendapatan sebesar 18,89%, sementara 40% golongan berpendapatan menengah memperoleh share 34,52% total pendapatan dan 20% golongan berpendapatan tinggi memperoleh 46,6% total pendapatan.

Tabel 5
Hasil Perhitungan Gini Ratio Untuk Kecamatan Daratan

Golongan Pendapatan	Pendapatan Dalam Kelas			Proporsi Kumulatif		Gini Ratio
	Jumlah	Rasio	%	%	Rasio	
20% terendah	32.500.000	0,0420	4,20	4,20	0,0420	0,0084
20% kedua	66.650.000	0,0860	8,60	12,80	0,1280	0,0256
20% ketiga	97.100.000	0,1253	12,53	25,33	0,2533	0,0507
20% keempat	155.200.000	0,2003	20,03	45,37	0,4537	0,0907
20% teratas	423.250.000	0,5463	54,63	100,00	1,0000	0,2000
Jumlah	774.700.000					0,3754
Gini Ratio						0,6246

Sumber: Data primer setelah diolah

Tabel 6
Proporsi Pendapatan Masyarakat

Kelompok Pendapatan	Daratan (%)	Pulau (%)
40% Kelompok Bawah	12,80	18,89
40% Kelompok Menengah	32,57	34,52
20% Kelompok Atas	54,63	46,60

Sumber : Data primer setelah diolah, 2012

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa ada proporsi yang cukup timpang antara golongan pendapatan di Kecamatan Daratan. 20% golongan berpendapatan rendah hanya menerima 4,20% total pendapatan sementara 20% golongan berpendapatan tinggi memperoleh share 54,63% dari total pendapatan. Angka gini ratio juga memperlihatkan bahwa ada ketimpangan distribusi pendapatan yang berada pada kategori tinggi yaitu 0,62.

Hal menarik yang dapat dilihat dari data tersebut adalah bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kecamatan Kepulauan dengan Kecamatan Daratan memang berbeda dan ternyata distribusi pendapatan di Kecamatan Kepulauan relatif lebih baik dibanding Kecamatan Daratan. Namun demikian dilihat pendapatan absolutnya pendapatan antara dua wilayah tersebut jauh berbeda.

Jika diperhatikan data tersebut, kelihatannya distribusi pendapatan di wilayah kepulauan relatif lebih merata dibanding wilayah daratan. Di wilayah daratan 40% kelompok bawah menerima 12,80% dari total pendapatan sedangkan di wilayah kepulauan 18,89%.

3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan

Untuk menguji beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab kemiskinan maka dilakukan pengujian statistik dan hasilnya menunjukkan bahwa :

1. Untuk wilayah kepulauan bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat mengikuti pola pendapatan yakni semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi pula pengeluaran konsumsi. Hal ini bermakna tingginya pengeluaran konsumsi masyarakat menjadi salah satu faktor terjadinya kemiskinan akibat menurunnya sisa pendapatan untuk saving atau untuk investasi.

Hubungan antara pengeluaran konsumsi dengan tingkat kemiskinan adalah positif

signifikan dengan nilai koefisien 0,9058 dan

Sedangkan untuk variabel pendidikan juga memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan dengan nilai koefisien regresi 0,2199 dan probabilitas 0,1142 dan variabel kesehatan (X_3) juga memiliki hubungan yang positif signifikan dengan tingkat pendapatan masyarakat.

Pola hubungan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen ditunjukkan dari nilai R (Korelasi) sebesar 0,8080 yang bermakna bahwa hubungan antara variabel-variabel penyebab kemiskinan dengan tingkat pendapatan masyarakat sangat kuat. Artinya, tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah kepulauan ditentukan oleh pola pengeluaran, tingkat pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Tingkat determinasi ketiga variabel independen terhadap variabel dependen adalah 65,32% yang berarti sekitar 63,32% tingkat pendapatan masyarakat dibentuk oleh faktor pengeluaran, pendidikan, dan kesehatan.

2. Hasil perhitungan statistik untuk wilayah daratan menunjukkan bahwa untuk wilayah daratan tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan hasil analisis untuk wilayah kepulauan.

3. Hal ini memberi makna bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat mengikuti pola pendapatan, semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula pengeluaran konsumsi. Tingginya pengeluaran konsumsi masyarakat menjadi salah satu faktor terjadinya kemiskinan akibat menurunnya sisa pendapatan untuk saving atau untuk investasi. Hubungan antara pengeluaran konsumsi dengan tingkat kemiskinan adalah positif signifikan dengan nilai koefisien 0,2208 dan probabilitas 0,000. Sedangkan untuk variabel pendidikan juga memiliki hubungan yang positif signifikan dan variabel kesehatan juga memiliki hubungan yang

positif signifikan terhadap tingkat pendapatan masyarakat.

Pola hubungan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen ditunjukkan dari nilai yang bermakna bahwa hubungan antara variabel-variabel penyebab kemiskinan dengan tingkat pendapatan masyarakat sangat kuat.

Artinya, tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah daratan juga ditentukan oleh pola pengeluaran, tingkat pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Tingkat determinasi ketiga variabel independen terhadap variabel dependen adalah 73,20% yang berarti sekitar 73,20% tingkat pendapatan masyarakat dibentuk oleh faktor pengeluaran, pendidikan, dan kesehatan.

Hasil analisis untuk dua wilayah studi tersebut memperlihatkan dua hal yang berbeda.

1. Wilayah kepulauan variabel pendidikan tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan sedangkan untuk wilayah daratan hubungannya signifikan.

2. Kedua, tingkat determinasi ketiga variabel yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat juga berbeda antara wilayah kepulauan dengan wilayah daratan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk wilayah kepulauan ketiga faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan memberi andil sebesar 65,32% sedangkan untuk wilayah daratan sebesar 73,20% yang berarti bahwa masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat di wilayah kepulauan karena masih ada sekitar 34,68% faktor diluar model regresi tersebut untuk ikut berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di wilayah kepulauan. Sementara untuk wilayah daratan kontribusi ketiga variabel yang dimasukkan dalam model adalah 73,20% yang berarti hanya sekitar 26,80% faktor lain di luar model yang menentukan kemiskinan.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. Strategi Penanggulangan Kemiskinan.

Berdasarkan kondisi obyektif dan posisi relatif daerah dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada wilayah dengan pola pembangunan dengan posisi relative kabupaten kepulauan, maka dibutuhkan strategi dan solusi yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi.

Adapun strategi yang dapat dilakukan melalui 3 pilar penanggulangan kemiskinan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi dan intervensi faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap kemiskinan.

Dengan strategi ini dimaksudkan agar kelembagaan yang ada di masyarakat dapat tumbuh kembangkan, baik kelembagaan ekonomi maupun kelembagaan sosial. Untuk kelembagaan ekonomi misalnya Usaha Kecil Mikro dan Koperasi, sedang kelembagaan sosial dapat berupa kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan, kelompok adat dan tradisi budaya secara progresif mendukung penguatan ekonomi lokal.

Penguatan Kelembagaan sosial ekonomi dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyebab kemiskinan, dimaksudkan bahwa dengan menguatkan kelembagaan sosial seperti kelompok-kelompok tani dan nelayan, asosiasi pedagang, dan lembaga-lembaga swadaya yang berorientasi pada kepentingan publik dihayatkan dengan melakukan penajaman-penajaman agenda aksi secara partisipatif aktif dan mendorong simpul-simpul kepedulian sosial ekonomi serta mengajak sesama untuk melakukan dan meminiasiasi bangkitnya ekonomi yang dibangun dari prakarsa lokal secara kreatif.

Memprakarsai pembentukan Pusat Pengembangan Ekonomi Lokal (PPEL) yang

nantinya menawarkan program strategis untuk merangsang masyarakat terlibat dalam proses pengembangan ekonomi yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat dan terintegrasi dengan pola perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan multi pihak. Baik jangka panjang, menengah, dan jangka pendek.

Penguatan kelembagaan ekonomi juga dimaksudkan untuk melakukan penguatan struktur modal usaha agar usaha-usaha yang digelutinya tidak sekedar lagi menggantungkan untuk hidup apa adanya tetapi juga berorientasi pada bagaimana menguatkan kelembagaan dari sisi peningkatan pemupukan modal sosial dan partisipasi mendorong secara bersama struktur modal yang berkesinambungan, sehingga memiliki posisi yang kuat dengan terindeks kelayakan hidup yang berkecukupan memberi nilai tambah atas kelembagaan ekonomi yang telah digelutinya.

Penting asosiasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Asosiasi-asosiasi sebagai bentuk kelembagaan ekonomi sosial selama ini seperti AKU-UPPKS) yang telah dirintis oleh BKKBN sebagai bentuk dari Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat. Dengan program yang dimilikinya dapat memperkuat kelompok ekonomi produktif atau kelompok ekonomi kreatif berbasis keluarga. Dengan itu dapat memperkuat simpul-simpul kegiatan ekonomi yang berbasis partisipatif. Sisi lain penguatan UMKM, pada berbagai sektor itu akan menyerap lapangan kerja. Hal ini harus didukung oleh pola pendekatan berbasis masyarakat untuk merangsang tumbuhnya aktivitas ekonomi desa dan kelurahan di wilayah kecamatan, baik melalui pendekatan tipologi dan sektor-sektor yang dianggap unggul, maupun wilayah kecamatan keperluan dengan suatu model pendekatan tersendiri.

Pola pendekatan ini memudahkan

program-program yang bersifat bantuan maupun program yang dianggarkan melalui APBD agar efektif menguatkan kelembagaan ekonomi dan sosial.

Dukungan lainnya yang bersifat partisipatif adalah meningkatkan fasilitas dialog diantara, mereka untuk menghasilkan ide-ide insiatif dan dikembangkan atas dasar kelembagaan yang disesuaikan dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan dunia usaha, serta mengajak kepada stakeholders lainnya terutama Perguruan tinggi dan Civil Society (CSO) yang peduli terhadap upaya peningkatan pendapatan yang disertai dengan penanggulangan kemiskinan.

Jika strategi ini dikembangkan secara berkesinambungan bukan tidak mungkin penguatan kelembagaan yang dimiliki oleh suatu daerah yang memiliki daerah kepulauan dan daerah yang terpinggirkan menjadi bagian yang turut memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan sekaligus menanggulangi kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung.

2. Optimalisasi Potensi lokal pada sektor-sektor ekonomi, baik basis maupun non basis. Dengan strategi ini dimaksudkan agar ekonomi lokal dengan isektor pertanian perlu mendapat perhatian sekaligus menyesuaikan dengan tingkat pendidikan masyarakat, sembari tetap memberi perhatian terhadap perkembangan pada industri olahan.

Kemudian membangun kemitraan yang kuat dengan pihak Semen Tonasa sebagai industri yang selama ini mendorong tumbuhnya ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama ini, namun dibutuhkan matrik program kemitraan agar secara simultan persoalan kemiskinan di daerah tersebut dapat diatasi dengan baik. Sekaligus sebuah perwujudan

tanggung jawab perusahaan yang wajib dilakukan bagi kepentingan lingkungan masyarakat setempat.

Berkaitan sektor pertanian berada pada posisi **kuadran ke III** itu artinya kelembagaan yang berorientasi pada sektor tersebut memiliki tanggung jawab berat untuk mengembangkan sektor ini dari sektor non basis menjadi sektor basis. Program pemerintah lebih mengarah pada penajaman program yang bersinggungan kuat dengan kelompok usaha tani dan nelayan sehingga kelembagaan ekonomi disektor tersebut semakin kuat.

Oleh karena kontribusi sektor pertanian secara empirik dalam pembahasan sebelumnya telah diketahui hasil pengukuran Indek LQ dan Tipologi, menunjukkan bahwa sektor basis adalah sektor industri pengolahan dan industri yang memberi kontribusi besar terhadap penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sementara potensi sektor disektor pertanian dan kelautan adalah sektor yang dianggap memiliki keunggulan, namun belum dioptimalkan dengan baik, sehingga, baik kontribusinya maupun pertumbuhannya hasil rendah dibandingkan dengan sektor industri. Itu juga yang menyebabkan sektor tersebut berada pada sektor non basis $LQ < 1$ dan berada pada tipologi pada posisi **kuadran ke III**.

Dampaknya adalah sumber pendapatan yang mestinya meningkatkan pendapatan perkapita tinggi jauh lebih diharapkan karena hampir 70 % penduduk masih berorientasi pada sektor tersebut. Terutama daerah – daerah kecamatan yang dianggap memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, baik berada didaerah perkotaan maupun di daerah kepulauan.

Karenanya dibutuhkan optimalisasi potensi pada wilayah kecamatan yang dimaksudkan dengan melalui program sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Jika berada di kepulauan, maka tentu dioptimalkan

sebuah program yang mendorong produktivitas di sektor kelautan, meningkatkan pendapatan nelayan dan memberi pendidikan khusus dalam meningkatkan keterampilan, demikian pula pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal pada wilayah tersebut.

Demikian pula pada kecamatan di wilayah daratan, diarahkan pada optimalisasi potensi lokal melalui pengembangan industri berbasis komunitas, memberi stimulus pembiayaan dengan melakukan aksi lokal khususnya dalam rangka menggairahkan ekonomi lokal berbasis masyarakat.

Hal ini dianggap lebih efektif jika dikembangkan dengan pola pengembangan UMKM sesuai sektor-sektor ekonomi dan fokus pada komoditi yang dapat menciptakan pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar manca negara. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam menggairahkan ekonomi lokal berbasis komunitas. Bagi komunitas yang berada pada daerah perkotaan yang dianggap miskin dapat diidentifikasi kecenderungan masyarakat setempat pola pengembangan ekonomi kreatif akan lebih sesuai dengan karakter masyarakatnya.

Ketika masyarakatnya dominan ke petani sawah, maka optimalisasi terhadap peningkatan nilai tambah usaha taninya harus ditingkatkan. Program-program selama ini kurang menyentuh dengan konsep penyuluhan satu arah mestinya diarahkan pada pola penyuluhan berbasis partisipatif dengan mengajak kepada masyarakat untuk membicarakan seperti apa yang dikehendaki dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan komoditi yang dihasilkan pada setiap subsektor pertanian yang digelutinya.

Selain itu mengajak kepada pihak kelompok – kelompok tani untuk belajar meningkatkan kualitas produksi dan tingkat efisiensi dalam pengelolaannya. Dengan itu memungkinkan usaha tani dapat memberi

keuntungan yang lebih prospektif dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Disamping usaha tani juga dibutuhkan penguatan struktur kehidupan dengan mengembangkan Industri Kecil berbasis pertanian dengan pola pengembangan ini hasil-hasil pertanian membutuhkan proses pengelolaan. Saat ini di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikenal sebagai penghasil subsektor perkebunan tanaman hortikultura dan buah-buahan. Mestinya ada pengelolaan dengan menggunakan teknologi sederhana untuk mengembangkan kearah industri berbasis rakyat agar industri rakyat dapat lebih tingkatan melalui Industri Kreatif yang membentuk kreativitas berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk, yang dibuat dan dihasilkan oleh tenaga pengerajin mulai dari desain awal sampai pada proses penyelesaian produk antara lain, meliputi barang kerajinan yang dibuat dari serpihan batu marmer, bambu, serat alam, kayu, kain, tanah liat dll.

3. Penciptaan lingkungan kondusif dan sinergitas serta kemitraan yang kuat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Dengan strategi ini dimaksudkan agar terdapat upaya yang berkesinambungan menciptakan kondisi yang dapat menghalau kemiskinan dari sisi ekonomi, iklim investasi harus ditumbuhkan untuk menarik para investor dan mengalokasikan sumber pembiayaan untuk pengembangan potensi yang dapat didorong dengan membangun kemitraan yang kuat, terutama dari pihak Tonasa yang selama ini mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Yakni mengajak kepada pelaku bisnis UMKM untuk bermitra dengan usaha tani agar memiliki posisi yang kuat dan dapat mengakses sumber permodalan dan pasar yang lebih luas. Itu artinya hasil

pertanian tidak hanya sekedar untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga diharapkan untuk dikembangkan dengan pola pengembangan agribisnis dimana masyarakat terlibat didalamnya.

Karena itu integrasi program kemitraan mestinya diarahkan pada pola pengembangan penanggulangan kemiskinan yang telah dirancang oleh pihak Pemda, sehingga secara simultan program penanggulangan kemiskinan berdampak langsung kepada kepentingan masyarakat setempat.

Selain itu dukungan investasi pengembangan infrastruktur daerah yang berupa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta, mengembangkan daerah yang masuk dalam kategori daerah yang terisolir, dan daerah yang memerlukan perhatian khusus terutama wilayah kepulauan dan wilayah perbatasan.

B. Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Agar strategi yang telah dikemukakan dapat dioperasionalkan, maka buku ini merekomendasikan arah kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

Adapun arah kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Prioritas kualitas pelayanan dimaksud sejalan dengan masalah – masalah yang dihadapi oleh penduduk miskin daerah, yakni peningkatan kapasitas pendidikan masyarakat dengan tekanan pada perluasan akses pendidikan serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan,

2) Perluasan akses pelayanan kesehatan, dan

3) Peningkatan kegiatan usaha masyarakat yakni :

(i) Dengan mengoptimalkan potensi sumber

daya lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya agar penciptaan lapangan kerja dapat teratasi dengan baik.

(ii) Alokasi anggaran untuk kegiatan investasi di daerah dalam penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada kegiatan investasi infrastruktur yang mendorong pemanfaatan potensi lokal sektor yang dianggap basis yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi lainnya.

(iii) Regulasi yang efektif untuk kelompok sasaran diprioritaskan pada program-program yang berorientasi kepada penduduk miskin yang benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Kemudian mengintegrasikan program-program lintas SKPD yang bermuara pada penanggulangan kemiskinan, sehingga terdapat kejelasan tanggung jawab masing-masing SKPD terkait dalam menanggulangi kemiskinan.

(iv) Mendorong prakarsa lokal untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Karena itu Pemerintah Daerah tetap diharapkan dapat memberi ruang bagi penduduk miskin untuk mengembangkan kemampuannya, sehingga ketergantungannya kepada program-program pemerintah tidak menjadi permanen.

A. Simpulan

Berkaitan dengan pembahasan pada bab sebelumnya dengan mengambil studi kasus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai sebuah gambaran kondisi daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Posisi relatif suatu daerah juga menggambarkan suatu daerah memiliki prospektif yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

2. Tipologi suatu daerah yang memiliki wilayah daratan dan wilayah kepulauan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus didukung dengan struktur ekonomi yang kuat. Jika daerah memiliki peranan sektor industri terhadap penciptaan Produk Domestik Bruto (PDRB) lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertanian dan sektor lainnya, maka sesungguhnya daerah tersebut diarahkan pada optimalisasi potensi lokal dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

3. Faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk miskin di wilayah studi yang memiliki wilayah Kepulauan terpola dalam 2 (dua) bentuk. Pada masyarakat wilayah kepulauan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pola pengeluaran konsumsi mereka yang tidak seimbang dengan tingkat pendapatannya.

Sedang masyarakat pada wilayah daratan, tingkat kemiskinannya dipengaruhi oleh pola pengeluaran konsumsi mereka, tingkat pendidikannya, serta fasilitas atau layanan kesehatan yang mereka peroleh.

4. Daerah yang memiliki potensi seperti tergambar dalam wilayah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, persoalan kemiskinan faktor yang paling dominan mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk miskin adalah pola pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi.

5. Daerah-daerah yang tidak mengembangkan sektor lapangan usaha baik basis maupun non basis secara simultan, maka pertumbuhan yang telah dicapainya tidak menjamin terciptanya peningkatan pemerataan kesejahteraan penduduk.

Bahkan tidak terciptanya pola distribusi pendapatan daerah yang merata bagi penduduk

lapis bawah yang jumlahnya berada pada kisaran 40% baik untuk wilayah kepulauan maupun untuk wilayah daratan.

6. Strategi yang efektif terhadap pola pengembangan daerah yang menjadi obyek telah ini akan lebih baik jika dan diarahkan pada penguatan kelembagaan, membangun sinergi yang kuat dan kemitraan yang kuat serta iklim yang kondusif. Hal ini hanya bisa berjalan baik jika diarahkan pada pola peningkatan pelayanan, mengoptimalkan potensi lokal pada sektor basis dan menciptakan keterkaitan sektor antara sektor industri dengan sektor pertanian, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis UMKM, agar struktur ekonomi jadi kuat dan tumbuh secara simultan diikuti dengan penurunan angka kemiskinan.

B. Rekomendasi

Agar tingkat kemiskinan dapat berkurang, maka Pemerintah Daerah segera mengambil langkah nyata berupa :

1. Melakukan inventarisasi penduduk miskin (*by name by address*), lengkap nama dan tempat tinggal mereka dengan prototipe kemiskinannya.
2. Melakukan pemilihan program intervensi untuk masing-masing penduduk miskin tersebut sesuai program yang disiapkan oleh pemerintah daerah (pembatasan kelahiran, akses pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan usaha, penggalakan budaya menabung, dan lain-lain).
3. Kelibatan pihak-pihak terkait untuk turut serta dalam penyusunan dan implementasi program penanggulangan kemiskinan daerah secara sinergis dan terintegrasi dengan program-program SKPD dalam lingkup pemerintah daerah.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan agar pembangunan ekonomi lokal dapat terintegrasi dengan kemampuan pembiayaan bagi aktivitas kelompok sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia, 2007, Mengurangi Kemiskinan, Indonesian Expanding Horizons, Jakarta.
- Bappeda Kab. Pangkep, 2007, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka.
- Bappeda Kab. Pangkep, 2010, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka.
- Brahmbatt, Milan, 2006, Kemiskinan di Indonesia Belum Terentaskan.
- Blakely, Edwar J.(1989) Plenning Lokal Economic Development Theory and Practice, Edition, Sage Publication Inc.California
- Brannen, Julia, 1999, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chenery, Hollis and, T.N. Srinivasan , 1989 Hand book Development Economic, Nort Holland Amesterdam New York Oxfood Tokyo.
- Dewanta, Awan Setya, (Ed), 1995, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia ICMI Orwil DIY, Yogyakarta.
- Erani, Yustika Ahmad,, 2003, Negara Versus Kaum Miskin, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Esmara, Hendra, 1986, Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta.

- Fox Piven, Frans, dan A.Cloward (1993), *Regulation the poor: The Fungtion of public walfer*, vontage books.
- Hoover, Edgar (1977) *Pengantar Ekonomi Regional*, FE-UI, Jakarta
- Jhingan, M.L, 2007, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1995, *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta
- Koentjaraningrat, 2004, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, 2000, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YPKN, Yogyakarta.
- Lerner, Daniel, 1978, *Teknologi, Komunikasi dan Pembangunan*, dalam Eduard Depari dan Colin Mc Andrew, eds, *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat* Tinggal Landas, Bina Aksara, Jakarta.
- Moelyono Mauled 2010, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif (Antara tuntutan dan Kebutuhan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim, Ishar Salim, Sallatang Arifin, dan Fattah Sanusi, 2007, *Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Pokok Penyebab Kemiskinan Kelompok Etnis Tioanghoa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat*, Universitas Tanjung Pura, Pontianak dan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Siagian, Sondang P, 2008, *Administrasi Pembangunan : Konsep, dimensi, dan strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudono, Sakirno, 1985, *Ekonomi Pembangunan: proses, masalah, dan dasar kebijaksanaan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suseno, Frans Magnis, (1986) *Kuasa dan Moral*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Tikson, Deddy. T,(2005), *Keterbelakangan dan Ketergantungan: Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia dan Thailand*, Ininnawa, Makassar.
- Todaro, Michael, (1983), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

ISSN 2088-7086



9 772088 708611